

Bab III

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA

3.1. Evaluasi Rencana Dinas Bina Marga

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD, dan disusun sesuai dengan prinsip pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Visi Kabupaten Grobogan pada periode tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Sedangkan misi jangka menengah daerah yang ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- b. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- c. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- d. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- e. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tidak terlepas dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, seperti mendukung pengembangan daerah, pusat-pusat perdagangan rakyat, pusat-pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pusat kegiatan perekonomian lainnya yang mendorong pembangunan ekonomi, yang kesemuanya tak terlepas dari sistem tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, serta tata laksana administrasi yang terbuka dan transparan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tupoksi sesuai target yang telah diamanatkan dalam RPJMD serta sudah digariskan dalam Renstra, perlu kiranya setiap tahun menjadikan target tersebut menjadi dasar perencanaan dan rencana kerja SKPD. Tolok ukur meliputi Capaian Kinerja Indikator Urusan dan Capaian Program Prioritas SKPD. Untuk mendapatkan dua capaian sesuai target perlu kiranya perencanaan yang matang, ketersediaan dana dan didukung peran serta dari semua elemen masyarakat,

Rencana kerja (Renja) | 2014

3.1.1. Evaluasi Capaian Kinerja indikator Urusan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun RPJMD	Target Akhir RPJMD	Target RPJMD pada Tahun					Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun			Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun (%)			Persentase Capaian Target Akhir RPJMD s/d Tahun 2012
		2010	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Panjang jalan (km)	883,10	883,10	883,10	883,10	883,10	883,10	883,10							
b	Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	18,84	42,98	22,60	32,55	32,55	39,06	42,96	27,33	30,33	31,89	120,92	99,95	97,97	74,19
c	Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)	47,25	61,58	49,61	54,70	54,70	57,43	60,30	28,77	30,33	42,66	57,99	97,92	77,99	69,27
d	Persentase jembatan kondisi baik (%)	60,79	77,59	63,83	70,37	70,37	73,89	77,58							

Rencana kerja (Renja) | 2014

3.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD

Program / Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun RPJMD	Target Akhir RPJMD	Target RPJMD pada Tahun				Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun (%)		
		2010	2016	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan (km)	883,10 km		883,10 km	883,10 km									
a. pembangunan jalan	panjang jalan yang akan dibangun	45 km/th	70 km/th	45 km/th	50 km/th	52 km/th	55 km/th	25,7	42,3	59,3		57,14	84,55	114,03
b. pembangunan jembatan	pembangunan jembatan yang akan dibangun	100 m/th	150 m/th	100 m/th	110 m/th	120 m/th	130 m/th	25 M	420	130,5		25	381,6	108,75

Dari data di atas asumsi target yang diamanatkan ternyata belum sesuai yang diharapkan, namun demikian dengan semua tantangan termasuk kendala keterbatasan dana menjadikan asumsi target dalam RPJMD bukan tidak mungkin tercapai, tentunya hal ini akan menjadi pelecut sehingga di tahun anggaran 2014 ini perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pemeliharaan menjadi lebih matang, terpadu serta terarah.

Sesuai data dan target yang diamanatkan dalam RPJMD bahwa Untuk tahun anggaran 2014 ketersediaan dana sekitar 40 milyar rupiah untuk program pembangunan jalan dengan target sekitar 55 km dan 1.3 milyar untuk program pembangunan jembatan dengan target sekitar 130 m, maka pemilihan jenis konstruksi menjadi lebih penting, tentunya hal ini tanpa mengabaikan sisi perencanaan teknis jalan dan jembatan.

Program Prioritas	%	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			2014	
			Target	Juta Rp.
A. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah				
1. Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan (km)	278,088 km	299,654 km	594.775
a) Pembangunan jalan	Panjang jalan yang akan dibangun	45 km/th	55 km/th	40.000
b) Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan yang akan dibangun	100 m/th	130 m/th	1.300

Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Prediksi Pendanaan

Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 Dinas Bina Marga

Seperti diketahui bahwa kondisi tanah di Kabupaten Grobogan yang labil/expansif dengan nilai CBR jauh dibawah 5 %, sehingga untuk pembangunan jalan harus menggunakan teknologi yang tepat (dalam hal ini dipilih konstruksi beton) yang tentunya memerlukan biaya yang jauh lebih besar. Namun demikian untuk ruas tertentu (misalnya ruas jalan dalam kota purwodadi) dan ruas jalan dengan nilai CBR di atas 5% masih memungkinkan dilakukan dengan menggunakan konstruksi ATB.

Dengan asumsi panjang ruas jalan kabupaten dengan nilai CBR di atas 5% hanya sekitar 10% dari total panjang jalan kabupaten (sekitar 89 km), maka komposisi konstruksi ATB : konstruksi Beton = 10% : 90%. Dengan demikian untuk

tahun 2014 ini perkiraan konstruksi ATB sekitar 5 km dan 50 km konstruksi beton dengan kebutuhan dana sebagai berikut :

A. Perbaikan dan pembangunan infrstruktur yang mendukung perekonomian daerah	KONSTRUKSI	Target (meter)	PERKIRAAN DANA (per 100 m)	TOTAL DANA
a) Pembangunan jalan	Panjang jalan ATB	5000	102.000.000	5.100.000.000
	Panjang jalan Beton	50000	180.000.000	90.000.000.000
b) Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan yang akan dibangun	130	50.000.000	6.500.000.000
			TOTAL	101.600.000.000

3.2. Analisa Pelayanan Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 8 Tahun 2008. Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan di bidang kebinamargaan serta pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang bina marga,
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga,
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga,
4. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga,
5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga,
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dinas
7. Pemberian rekomendasi perijinan di bidang bina marga,
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Mengingat tugas pokok yang dibebankan cukup berat, tentunya tak lepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut antara lain :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kebutuhan akan sarana transportasi menyebabkan jumlah dan tipe kendaraan bertambah sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini tentunya akan menuntut penyediaan prasarana transportasi yang berupa infrastruktur jaringan jalan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Tingkat perkembangan ekonomi di pusat-pusat produksi, pusat-pusat pertanian dan pusat ekonomi lainnya di beberapa daerah pedesaan/kecamatan yang maju dengan pesat secara tidak langsung menuntut penyediaan infrastruktur yang kuat dan aman baik untuk konstruksi jalan, jembatan ataupun bangunan penunjang lainnya.
3. Aset jaringan jalan kabupaten yang mencapai 890.01 km merupakan aset yang perlu dipelihara supaya tetap berfungsi, sehingga memerlukan pendanaan yang cukup besar baik dalam pembangunan maupun dalam pemeliharannya.
4. Jumlah kegiatan yang cukup banyak setiap tahunnya dan menyebar disemua wilayah kabupaten tentunya membutuhkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan lainnya, baik sebagai rekanan/penyedia maupun sebagai elemen pengguna jalan.
5. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi yang telah ditetapkan terutama kepada rekanan/penyedia tentunya membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan berdedikasi.